



**Isu Strategis dan Capaian
Reformasi Hukum
Ekonomi yg Telah
Berjalan sd. Saat ini**

**Upaya Reformasi
Hukum Ekonomi
yang Perlu Dilakukan
Kedepan**



**Reformasi Hukum
Ekonomi dalam
RPJMN 2020-2024**



Visi Indonesia 2045

INDONESIA 2045

Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur

Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ekonomi yang maju dan berkelanjutan

Pembangunan yang merata dan inklusif

Negara yang demokratis, kuat, dan bersih

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

- Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
- Percepatan industri dan pariwisata
- Pembangunan ekonomi maritim
- Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
- Pemantapan ketahanan energi dan air
- Komitmen terhadap lingkungan hidup

- Dalam periode 2016 – 2045, diharapkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7% per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.
- Target RPJPN 2005-2025 Indonesia menjadi negara **Upper-Middle Income Country** pada 2025
- Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045.
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045
- Sesuai laporan PDB Indonesia pada TW II 2022 ekonomi Indonesia **mengalami pertumbuhan sebesar 5,44%** dibandingkan dengan TW II tahun 2021

Target Pertumbuhan Ekonomi 2015-2045





Kinerja 10 Indikator EoDB 3 Tahun Terakhir

No	Indikator	2018	2019	2020
Overall Rank		72	73	73
1.	Starting a Business	144	134	140
2.	Dealing with Construction Permits	108	112	110
3.	Getting Electricity	38	33	33
4.	Registering Property	106	100	106
5.	Getting Credit	55	44	48
6.	Protecting Minority Investors	43	51	37
7.	Paying Taxes	114	112	81
8.	Trading Across Borders	112	116	116
9.	Enforcing Contract	145	146	139
10.	Resolving Insolvency	38	36	38

World Bank Group resmi **mengakhiri indeks EoDB** pada September 2021, karena **ketidakesuaian data pada laporan dan integritas data** beberapa negara seperti Tiongkok, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan. Saat ini sedang dilakukan pembahasan untuk mencari pengganti indeks EoDB.

Saat ini World Bank Group sedang mengembangkan instrumen pengukuran kualitatif terhadap lingkungan berusaha yang baru yaitu **Business Enabling Environment (BEE)**, yang memiliki 3 komponen penilaian yaitu : *regulatory framework, public service dan efficiency*. Edisi pertama laporan BEE **direncanakan akan terbit pada kuartal IV tahun 2023.**

Sumber : BKPM

Dampak Penghentian Survei EoDB

Terjadinya kekosongan indikator dan tidak adanya ukuran yang menjadi ukuran reformasi hukum ekonomi pasca dihentikannya pengukuran Indeks EoDB oleh World Bank Group



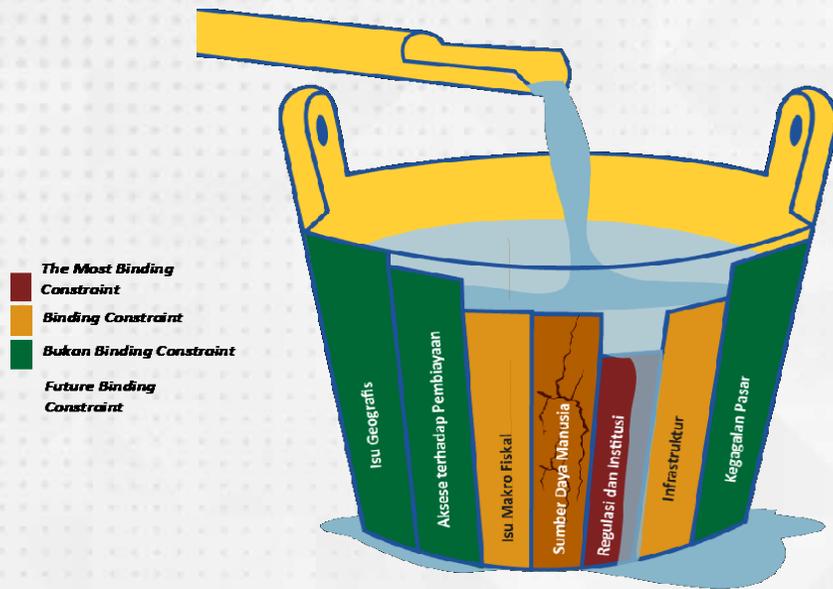
Telah banyak capaian yang dilakukan, namun belum sepenuhnya terdata dengan baik

Perlu penyusunan indikator pembangunan hukum ekonomi dan identifikasi kembali (*tracing*) capaian yang telah dilakukan sebagai *baseline*





Overview Kondisi Regulasi



- **Regulasi dan Institusi** adalah kendala paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi
- Regulasi yang kurang mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada **regulasi: Tenaga kerja, Investasi, Perdagangan**
- **Kualitas institusi rendah**, disebabkan korupsi, birokrasi tidak efisien dan lemahnya koordinasi antarkebijakan
- Jika tidak diatasi saat ini, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi

Sumber : Dit. Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, *Studi Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi/Growth Diagnostics, 2019*

- Perencanaan regulasi belum sepenuhnya didukung analisis dan evaluasi kebijakan serta peraturan berbasis **evidence based approach**
- **Ketidaksesuaian** perencanaan legislasi (Prolegnas, Progsun PP dan Progsun Perpres) dengan dokumen perencanaan pembangunan/KR RKP (**grafis**)
- Situasi **hiper regulasi** karena penyusunan peraturan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, materi muatan kurang tepat, dan tidak sinkron dengan peraturan lainnya
- Belum optimalnya mekanisme **evaluasi dampak** terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
- Target capaian perencanaan legislasi **tidak pernah mencapai 50%** (periode 2018-2020)

Perbandingan Perencanaan Peraturan dan Capaian Tahun 2021



Catatan :

Pengundangan PP tahun 2021 masih didominasi dengan PP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan BUMN

Sumber :

- Naskah Akademik RUU ttg Perubahan UU No.12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2017
- Paparan Kepala BPHN pada rapat tim pengarah penyusunan prolegnas prioritas tahun 2022, April 2021
- diolah dari RKP 2021, Prolegnas, Progsun PP dan Perpres 2021



Capaian Penting dalam Upaya Reformasi Hukum Ekonomi di Indonesia (1)



- Diterbitkannya sejumlah peraturan internal di MA yang mendukung arah kebijakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, kemudahan berusaha dan pengembangan peradilan modern.
- Terlaksananya pengadilan GS yang sesuai dengan prinsip "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".
- Dikembangkannya Sistem Peradilan Modern yang Transparan, Akuntabel dan berbasis TI serta pengembangan mekanisme *e-court* (tahun 2019 dikembangkan *e-litigation*)
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga dan Diklat Juru Sita



Pada 16 Agustus 2021 Presiden dalam Pidato Kenegaraannya Presiden mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, tetap menyelesaikan proses peradilan dengan tepat dan cepat. Jokowi juga mengapresiasi Mahkamah Agung yang membuat aplikasi e-Court demi mempermudah layanan peradilan berbasis elektronik.



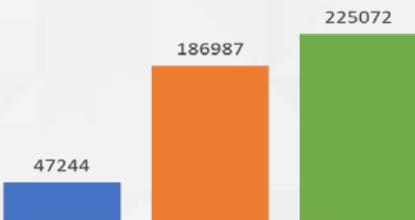
- Penyusunan Roadmap dan Pengembangan **Sistem Layanan Keperdataan** untuk pembentukan badan usaha, pendaftaran jaminan dan kepailitan secara *online* melalui aplikasi AHU *Online*
- **Kenaikan pendaftaran jaminan fidusia** setiap tahun setelah pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik pada 2013
- Diterbitkannya peraturan teknis mengenai kepailitan dan PKPU, salah satunya **Permenkumham No 37/2018** tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus

Trend Pendaftaran Jaminan Fidusia

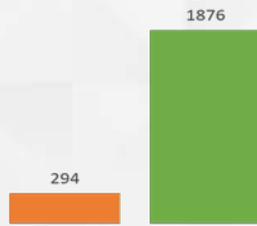


Sumber : Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum & HAM, diolah

Perkara E-Court pada Pengadilan Tk.Pertama



Perkara E-Court pada Pengadilan Tk.Banding



* aplikasi e- Court pengadilan Tk.Banding diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2020

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

■ 2020 ■ 2021



Capaian Penting dalam Upaya Reformasi Hukum Ekonomi di Indonesia (3)

Berdasarkan **UU No.13 tahun 2022** Proses Legislasi dilakukan dalam **5 (lima)** tahapan berikut:



RUU Kepailitan

Selama tahun 2021-2022 telah dilakukan pembahasan pada tingkat PAK. Pembahasan melibatkan instansi terkait diantaranya, MA, Kemensetneg, OJK, Kementerian KUKM, Kementeriankeu, Kementerian BUMN, dan BKPM.



RUU

Jaminan Benda Bergerak

Selama tahun 2021 dilakukan pembahasan pada tingkat PAK dan pada tahun 2022 telah dihasilkan Naskah RUU. Pembahasan melibatkan instansi terkait diantaranya, MA, Kemenhub, BKPM, OJK, dan Bappebti



RUU Badan Usaha

Telah dihasilkan **draft Naskah Akademik** beserta Draft Kebijakan Pendukung Naskah Akademik RUU Badan Usaha

RUU KUH Perdata

2021

Musyawarah pendahuluan, termasuk pembahasan dari daftar inventaris masalah dan pandangan mini fraksi.

2022

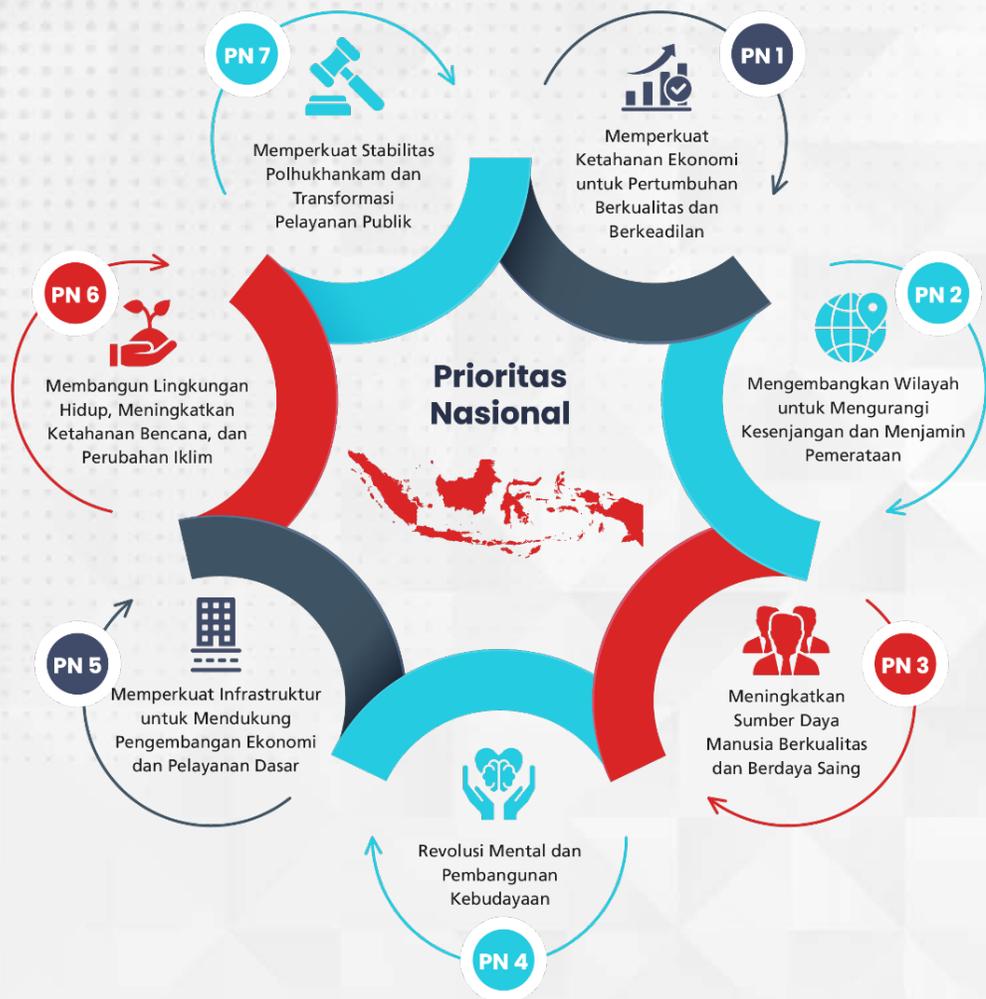
- Penyerahan dan pembahasan DIM RUU KUHPerdata oleh DPR kepada Pemerintah
- Konsinyering penyusunan jawaban DIM yang telah disusun oleh DPR



Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”





Tema RKP Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

PRODUKTIVITAS

- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- Mendorong pemulihan dunia usaha
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Infrastruktur digital dan konektivitas

INKLUSIF

- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi



BERKELANJUTAN

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)



TRANSFORMASI EKONOMI

1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi Digital
5. Integrasi Perekonomian Domestik
6. Pemindahan IKN



Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Indikator dan Target 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
3 Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0.65	0.73
3.1 Penataan Regulasi	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%
	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%
3.2 Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak*	120	70
	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan*	30	20
	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit*	30	20
3.3 Penguatan Sistem Anti Korupsi	Persentase Pelaku Residivis	11%	9%
	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14
3.4 Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Jumlah orang/kegiatan yang ditangani dengan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi	17.016 orang dan 4.571 kegiatan	18.418 orang dan 4.947 kegiatan

*World Bank Group resmi mengakhiri indeks EoDB pada September 2021



Kegiatan Prioritas Nasional K/ L yg Mendukung PN Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Kemudahan Berusaha dalam RKP 2020-2023

Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Kemudahan Berusaha



Peringkat EoDB Indonesia untuk Aspek Penegakan Kontrak



1. Penyusunan *Grand Design* Penguatan Kelembagaan Juru Sita **(2021)**
2. Pelaksanaan penguatan kualitas dan Kuantitas SDM Jurusita di Mahkamah Agung **(2020-2021)**
3. Pelatihan Eksekusi untuk Panitera dan Jurusita **(2022)**



1. Penyusunan RUU KUH Acara Perdata **(2020-2023)**
2. Penyusunan *Roadmap* dan Implementasi Integrasi Sistem Layanan Perdata termasuk Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Kepailitan **(2021-2022)**



Peringkat EoDB Indonesia untuk Aspek Penyelesaian Kepailitan



1. Pengembangan aplikasi E-court upaya hukum kasasi dan PK **(2023)**
2. Pengembangan portal perkara kepailitan dan PKPU **(2023)**



1. Penyusunan Revisi UU Kepailitan dan PKPU **(2020-2021)**
2. Penyusunan *Roadmap* dan Implementasi Integrasi Sistem Layanan Perdata (2021-2023) termasuk Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Kepailitan **(2021-2022)**



Peringkat EoDB Indonesia untuk Aspek Mendapatkan Kredit



1. Penyusunan RUU Jaminan Benda Bergerak **(2020-2023)**
2. Penyusunan RUU Badan Usaha **(2020-2023)**
3. Revisi Permenkumham No.10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
4. Penyusunan *Roadmap* dan Implementasi Integrasi Sistem Layanan Perdata termasuk Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Kepailitan **(2021-2022)**



Tujuan Penyusunan IRHE

- Kebutuhan tersedianya instrument pengukuran kemudahan berusaha di Indonesia yang dapat mengukur perkembangan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.
- Indeks tersebut perlu disusun dengan kriteria yang relevan dengan kondisi di Indonesia dan memperhatikan aspek-aspek yang belum dinilai dalam indeks survei sebelumnya
- **Tujuan pengukuran :**
 1. **Jangka Pendek** : menggantikan Indikator di RPJMN dan RKP sd. tahun 2024
 2. **Jangka Panjang** : merumuskan Indeks RHE yang komprehensif yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan dibidang hukum ekonomi

Best practices pada beberapa Indeks internasional termasuk EoDB

Penyusunan IRHE mengacu pada indikator di dalam Indeks EoDB yang dapat digunakan/diadopsi sebagai indikator penyempurnaan hukum ekonomi di Indonesia, terutama terkait dengan *enforcing contract, resolving insolvency dan getting credit*

Measurable
Kriteria pengukuran indikator jelas target, satuan dan sumber datanya.

Relevant
Adanya kesesuaian antara kriteria indikator dengan tujuan pengukuran





(2)



Aspek Penegakan Putusan Pengadilan (*Enforcing Contract*)



1. Persentase penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana
2. Persentase penyelesaian perkara melalui e-court (*e-filing, e-payment, e-summons* dan *e-litigasi*)



Aspek Penyelesaian Kepailitan (*Resolving Insolvency*)



Persentase pemanfaatan SIPP untuk pengurusan dan pemberesan harta debitur pasca putusan Kepailitan dan PKPU



Aspek Akses terhadap Pembiayaan (*Getting Credit*)



Persentase peningkatan pendaftaran jaminan fidusia



Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan IDLO (*International Development Law Organization*) melakukan penyusunan Grand Desain Penyempurnaan Hukum Ekonomi Indonesia untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pada tahun 2019



Kerangka Hukum Memulai Usaha

1. **Penyelesaian RUU Badan Usaha** yang mampu mendorong inovasi dan kewirausahaan serta pembentukan badan usaha dengan mudah dan sederhana
2. Mengoptimalkan proses penataan perizinan, termasuk melalui kebijakan deregulasi



Kerangka Hukum untuk Mendorong Kemudahan Akses Terhadap Pembiayaan

1. **Penyelesaian RUU Jaminan Benda Bergerak**, yang mengakomodir system gadai tanpa penguasaan terhadap benda bergerak (*non-possessory pledge*).
2. Membangun database register jaminan benda bergerak berbasis TI
3. Penyederhanaan sistem pembuatan dan pendaftaran jaminan fidusia (Sederhana, Murah dan Efektif).



Optimalisasi Sistem Eksekusi (*Enforcing Contract*)

1. Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Keuangan dan Hak Milik Kebendaan.
2. Penyusunan regulasi tentang penghinaan pengadilan (*contempt of court*)
3. Reformasi institusi dan tata laksana eksekusi



Optimalisasi Sistem Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. **Penyelesaian perubahan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU** sebagai perangkat hukum dalam bidang kepailitan dan PKPU yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha.
2. Revitalisasi dan reorientasi prosedur kepailitan menjadi proses yang lebih konstruktif, dan secara akuntabel mampu melakukan redistribusi aset dari usaha yang gagal ke unit-unit ekonomi yang lebih produktif.
3. Pengembangan sistem informasi badan usaha dan portal informasi kepailitan yang terintegrasi



Membangun Indikator Pembangunan Hukum Ekonomi dalam RPJPN 2025-2045

Latar Belakang

- Belum adanya indikator dibidang reformasi hukum ekonomi yang dapat menggambarkan capaian pembangunan bidang hukum ekonomi
- Telah banyak capaian yang dilakukan, namun tidak terdokumentasikan dengan baik
- Diperlukan penyusunan indikator yang dapat mengukur capaian pembangunan hukum ekonomi yang memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, komprehensif dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Negara Indonesia

Tujuan Pengukuran

- Indikator atau Indeks Reformasi Hukum Ekonomi akan menjadi masukan dan digunakan dalam RPJPN 2025-2045
- Sebagai alat ukur menilai keberhasilan pembangunan dibidang hukum ekonomi
- IRHE juga sebagai pendorong untuk perbaikan kinerja

Kriteria Penyusunan IRHE

1. *Best practices* indeks baik di tingkat nasional maupun internasional (komponen-komponen dalam indeks EoDB, GCI, RoL)
2. Mengukur aspek hukum dalam kemudahan berusaha sejak dimulainya suatu bisnis sampai dengan proses kepailitan. Aspek tersebut meliputi :
 - a. Administrasi badan hukum (*Starting business*)
 - b. jaminan kebendanaan,
 - c. kepailitan dan PKPU → *insolvency recovery rate*
 - d. penegakan hukum kontrak dalam penanganan perkara perdata
2. Mengukur kualitas substansi regulasi yang berkaitan dengan kemudahan berusaha
3. Indeks kualitas proses yudisial



Aspek Kelembagaan Eksekusi

Sasaran Strategis : Terwujudnya penguatan struktur kelembagaan eksekusi perdata di lembaga pengadilan



Strategi Kebijakan :

1. Review atas kondisi kesenjangan dan kebutuhan kelembagaan pengadilan
2. Rekomendasi berupa pengembangan struktur organisasi di MA yang mengelola kewenangan terkait eksekusi mencakup pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan eksekusi oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti
3. Revisi Hukum Acara Perdata dan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai penguatan kelembagaan eksekusi
4. Penyusunan revisi Perpres SOTK MA untuk pembentukan unit kerja baru yang mengelola kewenangan terkait eksekusi



Aspek Pembaruan Tata Kelola Pelaksanaan Eksekusi

Sasaran Strategis : Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan pelaksanaan eksekusi perdata yang efektif dan efisien, meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan eksekusi dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan putusan eksekusi serta pengaturan tentang mekanisme dan standar biaya eksekusi



Strategi Kebijakan :

1. Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata (penguatan tata Kelola)
2. Inisiasi regulasi yang mengatur tentang ketentuan penghinaan pengadilan bagi yang tidak melaksanakan putusan pengadilan (*contempt of court*), termasuk menciptakan ekosistem dimana tidak ada tempat bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan, contohnya mencabut akses debitur kepada akses ke pelayanan publik, dll
3. Evaluasi peraturan perundang-undangan eksisting yang berpotensi menghambat eksekusi
4. Penyusunan regulasi terkait efektifitas pelaksanaan putusan eksekusi dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan putusan
5. Penyusunan PERMA terkait standar biaya eksekusi
6. Pengembangan sistem e-court untuk pembayaran biaya eksekusi secara online
7. Penyusunan *Grand Design* pemanfaatan TI di lingkungan MA yang salah satunya memuat terkait perbaikan tata kelola pelaksanaan eksekusi
8. Penyusunan revisi Perpres SOTK MA untuk mengelola kebijakan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi di pengadilan



Aspek Kerjasama Antar K/L Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dan Interkoneksi Data

Sasaran Strategis :

1. Terbangunnya ekosistem pelaksanaan eksekusi dan keterhubungan putusan pengadilan dengan K/L terkait
2. Terwujudnya perluasan akses informasi dan integrasi data antar K/L untuk kebutuhan pelaksanaan eksekusi

Strategi Kebijakan :

1. Penyusunan MoU atau Peraturan Bersama antar K/L terkait pelaksanaan eksekusi (MA, Kemendagri (Dukcapil), OJK, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Polri, BI, dan K/L terkait lainnya)
2. Pengembangan *database* perkara perdata yang terkoneksi
3. Pengembangan sistem informasi layanan keperdataan (Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Kepailitan)
4. Penguatan peraturan pelaksana penelusuran aset dan tata kelola penelusuran aset
5. Pengembangan protokol pertukaran data
6. Reviu UU Perbankan terkait dengan rekening bank dan/atau penelusuran aset dalam perkara
7. Penguatan kerangka regulasi yang mengatur tentang pembekuan aset, akses terhadap layanan dll untuk kepentingan eksekusi
8. Penyusunan *Grand Design* pusat data eksekusi



Aspek Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Sasaran Strategis :

1. Penguatan kompetensi SDM juru sita yang akan ditugaskan dalam sistem Eksekusi.
2. Terlaksananya penguatan Jurusita dari sisi jumlah yang sesuai dengan beban kerja masing-masing wilayah yurisdiksi pengadilan

Strategi Kebijakan :

1. Penyusunan kajian analisis beban kerja Jurusita termasuk rincian kompetensi/kinerja dan jenjang karir Jurusita
2. Pelaksanakan penyempurnaan kurikulum dan modul pelatihan jurusita serta pelaksanaan diklat/bimtek Jurusita
3. Perekrutan juru sita dan juru sita pengganti dengan mempertimbangkan beban eksekusi pengadilan dan merujuk pada data statistik permohonan eksekusi.
4. Penyusunan peraturan internal yang mewajibkan pengadilan untuk memiliki juru sita dan juru sita pengganti yang jumlahnya minimal sama dengan jumlah kecamatan dalam wilayah yurisdiksi pengadilan
5. Sertifikasi Profesi Pelaksana Eksekusi



Upaya Reformasi Hukum Ekonomi yang Perlu Dilakukan Kedepan

Pengaturan bisnis digital secara lintas batas negara berkaitan dengan persaingan usaha, perlindungan konsumen, kekayaan intelektual dan pemberdayaan UMKM

Bisnis Transnasional

Penguatan pemanfaatan TI guna memberikan keterbukaan akses data, optimalisasi teknologi informasi dan interkoneksi antar K/L untuk meningkatkan Layanan sistem keperdataan

Teknologi Informasi

Penguatan kerjasama dan koordinasi antar K/L terkait dalam upaya perbaikan Layanan Keperdataan untuk mendukung kemudahan berusaha

Kelembagaan

1. Evaluasi atas kedayagunaan dan relevansi regulasi bidang ekonomi dengan perkembangan zaman
2. Percepatan penyusunan regulasi dalam bidang ekonomi untuk kemudahan berusaha dan perbaikan iklim investasi (hukum formil & materiil)

Regulasi





Kementerian PPN/
Bappenas



G20 INDONESIA
2022

Terima Kasih

